

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAKI RI
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional
Jl. May. Jen. Sutoyo - Cililitan - Jakarta Timur

Sumber: KORAN TEMPO	Hari/Tgl: 1 - 8 - 2011	Hlm/Kol: 4x/1-4
Subjek: REVOLUSI - NEGARA ARAB		Bidang: 9

Memenangkan Masa Transisi

Sri Mulyani Indrawati

MANAGING DIRECTOR WORLD BANK GROUP, MANTAN MENTERI EKONOMI REPUBLIK INDONESIA

Apakah musim bunga di negara-negara Arab itu sudah berubah menjadi musim gugur yang suram? Dengan penindasan brutal yang sekarang terjadi di Suriah, perang saudara berdarah di Libya, dan semakin goyah dan dekatnya Yaman ke jurang kekacauan-balaian, makin banyak orang yang skeptis. Walaupun gerakan pro-demokrasi di Mesir dan Tunisia berhasil dengan cepat membawa perubahan rezim, ketidakpastian masih menyelimuti kedua negara itu. Setelah sebentar timbul harapan, sekarang banyak pengamat bertanya-tanya apakah kawasan ini mampu menghasilkan demokrasi yang dapat bertahan dan berkembang serta ekonomi yang tumbuh pesat.

Revolusi dan konsekuensinya sudah tentu selalu merupakan masa-masa yang cair dan berubah-ubah, dan hasil akhirnya sering kali bertenger di ujung pisau yang tajam. Menjembatani kesenjangan yang lebar antara ekspektasi yang tinggi dan realitas keterbatasan anggaran serta kemampuan merupakan ujian tersendiri. Menebus ketidakadilan masa lalu dan membangun ekonomi yang membukakan peluang bagi semua merupakan tantangan utama juga, tantangan yang penuh ketidakpastian dan bahaya oportunisme politik.

Tapi transisi juga merupakan masa-masa terbukanya peluang. Pada 1990-an, saya termasuk di antara mereka di Indonesia yang menuntut dan merayakan dilengserkannya otokrat Soeharto. Saya bergabung

dengan pemerintah yang baru setelah jatuhnya Soeharto. Banyak pengamat yang meramalkan Indonesia, negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, tidak akan mampu melanggengkan demokrasi dan pada akhirnya bakal merosot ke jurang kekacauan. Tugas yang kami hadapi sangat berat. Tapi kami berhasil membuktikan kelirunya ramalan orang-orang yang skeptis, dan kami berhasil menarik beberapa pelajaran yang sangat mendasar.

Mungkin pelajaran paling penting yang kami peroleh adalah bahwa tidak ada solusi satu ukuran yang pas bagi tercapainya demokratisasi. Tiap negara di Timur Tengah dan Afrika Utara menghadapi tantangannya masing-masing, yang harus diatasi tiap negara dengan caranya sendiri. Walaupun demikian, mereka semua harus secara riil dan simbolis melepaskan diri dari masa lalu. Pemerintah yang baru harus menyampaikan sinyal yang kuat bahwa cara-cara lama sudah berakhir.

Perubahan harus dimanifestasikan secara formal dengan undang-undang baru yang disebarluaskan. Undang-undang yang memberdayakan warga dengan kebebasan menyatakan pendapat, pemilihan umum yang bebas dan independen, serta kebebasan berserikat mutlak diberlakukan. Harus dinyatakan dengan jelas bahwa tidak seorang pun berada di luar jangkauan hukum. Yang kurang daripada itu akan merusak transisi yang diperjuangkan. Lagi pula, korupsi di mana-mana merusak upaya pem-

SUMBER:

HARI/TGL.:

HLM/KOL.:

BID:

bangunan. Maka, pemerintah yang baru harus bergerak cepat membentuk lembaga-lembaga dan menerapkan prosedur-prosedur untuk melawannya.

Transparansi dan akuntabilitas merupakan gagasan yang didukung hampir secara universal. Artinya, para pemimpin pemerintahan yang baru jangan menyerah ketika perjuangan mengalami hambatan. Dalam hal ini, organisasi-organisasi masyarakat madani, masyarakat-masyarakat setempat, wakil-wakil masyarakat miskin, serta kaum wanita memainkan peran yang sangat penting, dan mereka harus diikutsertakan dalam tiap tingkat pengambilan keputusan.

Di Indonesia, kami sudah menandatangani seratus undang-undang dalam waktu kurang dari 18 bulan, yang meliputi segala bidang dari kebebasan media sampai undang-undang pemilihan umum, anti-korupsi, desentralisasi, dan anti-monopoli. Kami meratifikasi legislasi keuangan publik yang baru dan menjamin independensi bank sentral negeri kami.

Para pemimpin baru juga harus siap menghadapi dan mengelola *setback* yang timbul. Pada masa-masa pasca-revolusi, ekspektasi melambung tinggi, sementara rintangan untuk memenuhi ekspektasi itu

bertabrakan di mana-mana. Saya tahu dari pengalaman pribadi bahwa kami tidak selalu mendapatkan hasil terbaik yang kami harapkan. Kami harus berkompromi dan menerima hasil terbaik yang mungkin dapat kami capai.

Ancaman terhadap keamanan termasuk di antara *setback* paling serius pada masa-masa transisi. Sentimen nasionalistik sangat kuat dan para politikus serta kelompok-kelompok kepentingan bisa memanfaatkan sentimen itu. Sering kali aparat keamanan merupakan sisa-sisa rezim lama, dan tidak terdapat sistem yudisial yang independen. Reformasi memakan waktu, dan birokrasi

Mungkin pelajaran paling penting yang kami peroleh adalah bahwa tidak ada solusi satu ukuran yang pas bagi tercapainya demokratisasi. Tiap negara di Timur Tengah dan Afrika Utara menghadapi tantangannya masing-masing, yang harus diatasi tiap negara dengan caranya sendiri.

peninggalan rezim yang lama mungkin tidak akan mampu melaksanakannya.

Di Indonesia, kami menggunakan berbagai inovasi untuk mengatasi dilema seperti

itu. Misalnya, kami menunjuk seorang hakim independen untuk mengambil alih pengadilan kepailitan dan korupsi, karena hakim karier di pengadilan itu sudah terla-

lu banyak cacatnya. Begitu pula, ketika kami memulai program bantuan langsung tunai sebagai bagian dari agenda pro-rakyat miskin, kami meminta masyarakat menyelenggarakan prakarsa-prakarsa ini.

Lebih-lebih lagi, para pemimpin baru sebaiknya memberikan jaminan bahwa ekonomi menunjukkan kinerja yang baik. Memulihkan kegiatan ekonomi dan menciptakan lingkungan yang menyenangkan bagi para pengusaha itu penting, terutama bagi pengusaha kecil-menengah yang merupakan mesin penggerak utama penciptaan lapangan kerja. Patut diingat bahwa revolusi-revolusi yang terjadi akhir-akhir ini dimulai dengan pembakaran diri seorang pedagang buah Tunisia yang dikejar-kejar dan dihina para penguasa.

Tapi keberhasilan ekonomi tanpa akuntabilitas dan rangkulan sosial tidak akan dapat berlanjut, dan pemerintah yang baru sering dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit untuk melindungi rakyat miskin. Pemerintah yang baru itu mungkin terpaksa menghapus subsidi yang salah sasaran guna membebaskan sumber-sumber daya yang ada, untuk program-program penciptaan lapangan kerja dan pengentasan masyarakat miskin yang efisien dan tepat sasaran.

Di Indonesia, kami terpaksa menarik garis antara yang sangat miskin dan yang hampir miskin. Kami tidak bisa menaikkan gaji atau menyediakan subsidi untuk setiap orang. Bantuan yang kami berikan harus tepat sasaran. Maka, sementara kami membantu mereka yang paling membutuhkan, kami tidak memberikannya kepada mereka yang tidak cukup miskin untuk menerima bantuan itu—suatu pilihan yang sulit dan tidak populer.

Negara-negara dalam transisi perlu bantuan—bukan cuma uang, tapi juga cara (*technical know-how*) melaksanakan reformasi yang sangat kompleks itu. Ketika saya menjabat Menteri Keuangan, saya membawahkan 64 ribu pegawai. Tapi, ketika kami harus memodernisasi sistem perpajakan, kami tidak menemukan pakar yang kami butuhkan itu di mana pun di negeri kami.

Ya, kami membutuhkan bantuan dari luar, tapi kami tidak pernah menyerahkan "kepemilikan" proses reformasi kami. Kami mengusahakannya sendiri. Jika kami rakyat Indonesia tidak menguasai transisi kami sendiri, ia bakal dengan mudah mengalami kegagalan. Pelajaran itu juga pelajaran yang harus diingat semua negara dalam transisi. ●